



KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Pengukuran Kinerja.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Kepada semua yang telah terlibat dalam proses penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Tuhan memberkati kita.

Melonguane, Januari 2026

Kepala Dinas,



STELLA F. BENTIAN, S.Si, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19811203 200312 2 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tahun 2025. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Bidang Statistik dan Persandian. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja. Adapun tujuan, sasaran strategis beserta indikator sasaran yang termuat dalam PK sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2020-2025 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud adalah seperti pada tabel dibawah ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KET.
1	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN KABUPATEN TALAUD YANG BAIK, BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN	TERWUJUDNYA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH YANG BERKUALITAS	INDEKS SPBE	
		TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG RESPONSIF TERHADAP LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE KONTEN LAYANAN PEMERINTAHAN YANG MENDAPATKAN RESPON POSITIF DARI MASYARAKAT	
		MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PD YANG TERKAIT PELAYANAN PUBLIK DENGAN SARANA PRASARANA TIK DALAM KONDISI BAIK	
			PERSENTASE KECAMATAN YANG KUALITAS PELAYANAN PUBLIKNYA BAIK DENGAN SARANA DAN PRASARANA TIK DALAM KONDISI BAIK	
		TERWUJUDNYA AKURASI DATA STATISTIK DAN INFORMASI KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH YANG VALID DAN BERKUALITAS	PERSENTASE DATA STATISTIK DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksud, LKj.IP ini disusun dengan

tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 4 sasaran yang terdiri dari 5 indikator kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2025 meliputi:

1. Capaian kinerja $\geq 95\%$ sebanyak 4 Indikator Sasaran dari total 5 indikator kinerja
2. Capaian kinerja ≥ 80 sebanyak 1 Indikator Sasaran dari total 5 indikator kinerja

Pengukuran kinerja juga membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan data capaian kinerja tahun sebelumnya, dengan target jangka menengah dan dengan target nasional tahun 2024, analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja.

LKj.IP ini turut menginformasikan Program yang mendukung sasaran dan realisasi anggaran Program Strategis, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2025.

Dalam mencapai Target Kinerja sesuai dengan PK Tahun 2025 terdapat kendala yang dihadapi yaitu ketersediaan anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian indikator kinerja pada PK, keterbatasan SDM Teknis dalam pelaksanaan Tupoksi dan juga keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang ada di OPD dalam pencapaian target kinerja sasaran. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja adalah dengan memaksimalkan SDM, anggaran dan sarana prasarana yang telah tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu melakukan pengusulan penambahan SDM Teknis ke BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud dan juga melakukan pengusulan penambahan Anggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2025 untuk pencapaian Target Kinerja sesuai PK Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Fungsi dan Kewenangan dan Struktur Organisasi 2

1.3. Struktur Organisasi 3

1.4 Sumber Daya Manusia 4

1.5 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis 7

2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih 7

2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 7

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 11

3.2. Realisasi Anggaran 36

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 38

4.2 Saran 39

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Gol Kepangkatan	4
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan jenjang Pendidikan	4
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
Tabel 3.1.1 Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025	12
Tabel 3.1.2 Perbandingan antara pencapaian target Kinerja Tahun 2025 dan Capaian Target Kinerja pada Tahun sebelumnya	25
Tabel 3.1.3 Perbandingan antara pencapaian target Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Renstra	28
Tabel 3.1.4 Perbandingan antara pencapaian target Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional	30
Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Sasaran	36
Tabel 3.2.2 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang bersih, transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten kepulauan Talaud pada urusan Bidang Komunikasi dan Informasi dan urusan Bidang Statistik serta urusan Persandian yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Talaud melalui Sekretaris Daerah.

Melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) telah disempurnakan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2024 yang menyangkut dengan tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.

1.2. TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1 Tugas Pokok Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud pada urusan bidang komunikasi dan informatika dan urusan bidang statistic serta urusan bidang persandian yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Talaud melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1.1.2 Fungsi dan Kewenangan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, mempunyai fungsi :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

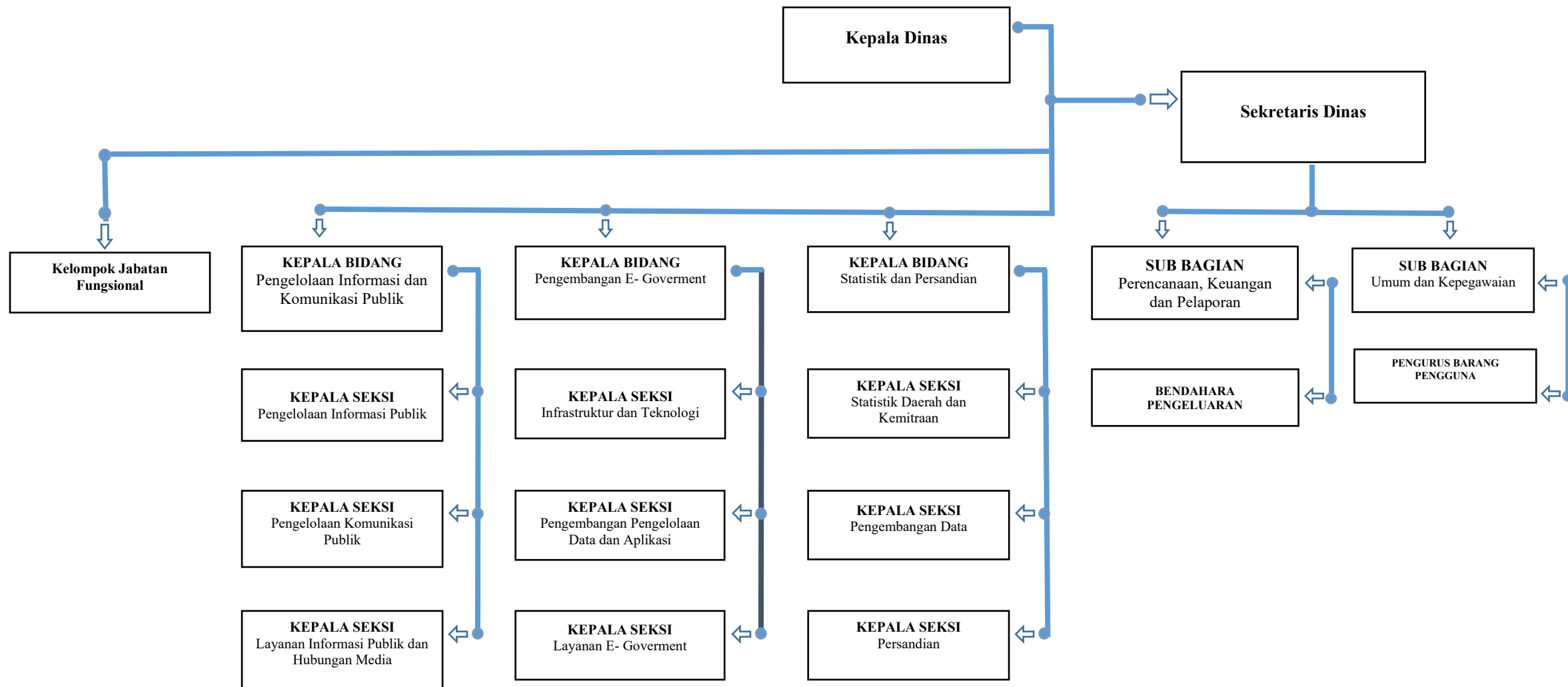
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- c. pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - Sub Bagian Program, Keuangan dan pelaporan
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 - Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 - Seksi Layanan Informasi Publik dan Media
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi :
 - Seksi Pengembangan , Pengelolaan data dan aplikasi
 - Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - Seksi Layanan Government
5. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :
 - Seksi Statistik daerah dan Kemitraan
 - Seksi Pengembangan Data
 - Seksi Persandian

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK



1.4 Sumber Daya Manusia

1.4.1 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Untuk menunjang Berdasarkan data Kepegawaian pada akhir 2025, jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik berjumlah 24 orang yang terdiri dari 23 orang PNS dan 1 orang PPPK. Pegawai PNS terdiri dari 1 orang eselon II, 4 orang Eselon III, 6 orang Eselon 4, 11 orang pegawai staf Golongan III dan 1 orang staf Golongan II.

Adapun perincian PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menurut golongan ruang kepangkatan, jenjang pendidikan dan pendidikan penjenjangan (posisi Desember 2025), pada tabel I, II dan III di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan kepangkatan

No	Golongan / Kepangkatan		Jumlah Pegawai
1	Golongan I	I/c	0
		I/d	0
2	Golongan II	II/a	0
		II/b	1
		II/c	0
		II/d	0
3	Golongan III	III/a	5
		III/b	4
		III/c	4
		III/d	3
4	Golongan IV	IV/a	3
		IV/b	2
		IV/c	1
		IV/d	0
Jumlah Total			23

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	3
4	Ahli Madya / DIII	1
5	D IV	0
6	S1	14
7	S2	5
8	S3	0
Jumlah		23

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu :

a. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah ;
- Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
- Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah;
- Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah ;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
- Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-commerce*;
- Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
- Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.
- Belum terbangunnya sarana dan prasarana Intra Pemerintah Daerah dalam menunjang Pelaksanaan SPBE

b. Bidang Urusan Statistik

- Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
- Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;

- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
- c. Bidang Urusan Persandian
- Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah ;
 - Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
 - Belum tersedianya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah termasuk Jabatan Fungsional Bidang Urusan Persandian

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud berpedoman pada dokumen perencanaan Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud antara lain Renstra 2020 –2025 dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap keberhasilan / kegagalan atas target sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk efektifitas pencapaian target sasaran kinerja, disusun prioritas kinerja berupa program yang memiliki daya dukung dengan capaian sasaran pembangunan daerah sebagai langkah strategik dalam suatu sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dalam menerapkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara terstruktur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang memiliki sasaran strategis dan ukuran pencapaian yang terukur.

2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Renstra Tahun 2020 – 2025 merupakan gambaran rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud untuk lima tahun kedepan. Adapun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025 terfokus untuk mencapai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Di Berkati”** dan mendukung pencapaian Misi 2 yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Talaud yang Elok ”**

2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Untuk mendukung terealisasinya pelaksanaan visi dan misi

Kabupaten Kepulauan Talaud, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk memberikan arah terhadap tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2025 adalah :

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN KABUPATEN TALAUD YANG BAIK, BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tertentu dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan / kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur (kuantitatif) dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 adalah :

1. TERWJUDNYA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH YANG BERKUALITAS;
2. TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG RESPONSIF TERHADAP LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH;
3. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH;
4. TERWUJUDNYA AKURASI DATA STATISTIK DAN INFORMASI KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH YANG VALID DAN BERKUALITAS

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan 2020-2025.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen perjanjian Kinerja merupakan Dokumen pernyataan kesepakatan dan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun antara atasan dan bawahan yang ditetapkan pada suatu instansi. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 adalah seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Perubahan 2020-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWJUDNYA LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH YANG BERKUALITAS	INDEKS SPBE	3
2.	TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG RESPONSIF TERHADAP LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE KONTEN LAYANAN PEMERINTAHAN YANG MENDAPATKAN RESPON POSITIF DARI MASYARAKAT	70%
3.	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PD YANG TERKAIT PELAYANAN PUBLIK DENGAN SARANA PRASARANA TIK DALAM KONDISI BAIK	65%
		PERSENTASE KECAMATAN YANG KUALITAS PELAYANAN PUBLIKNYA BAIK	63,15%
4.	TERWUJUDNYA AKURASI DATA STATISTIK DAN INFORMASI KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH YANG VALID DAN BERKUALITAS	PERSENTASE DATA STATISTIK DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud selaku pengemban Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

LKj.IP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2020-2025. Dengan disusunnya LKj.IP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari kelompok indikator masing – masing urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan urusan Persandian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025, terdapat 4 (empat) sasaran strategis serta 5 (Lima) indikator yang dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerjanya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025.

3.1. Pegukuran Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (2025)

Pengukuran tingkat kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator Sasaran Strategis dan realisasinya

Dari 4 (empat) sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud diukur tingkat capaian target kinerja dengan 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2025 yaitu :

Tabel 3.1.1
Pencapaian target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025

Misi 2 : Mewujudkan Kabupaten Talaud yang Elok					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas	Indeks SPBE	3.00	2.39	79,67
2.	Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Persentase konten Layanan Pemerintahan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat	70%	100%	142,86
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik	65%	55,17%	84,88%
		Persentase kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik	63,15%	63,15%	100.00
4	Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas	Persentase data statistik dan informasi pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah	100%	82.61%	82.61

Pada Tabel 3.1.1 Pencapaian target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 di atas dapat dijelaskan :

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik, target yang harus dicapai sesuai dengan Renstra Perubahan 2020-2025 adalah sebesar 3 poin. Hasil yang dicapai adalah 2,39 poin atau sebesar **79,67%**. Nilai ini masih menggunakan capaian nilai Indeks SPBE Tahun 2024 karena perubahan regulasi maka penilaian Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Talaud tidak dilaksanakan oleh Kementerian Pan RB. Untuk Nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebesar 2,39 poin sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Republik Indonesia

Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistim Pemerintah Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan pemerintah Daerah Tahun 2024. Di bawah ini screenshoot lampiran hasil evaluasi SPBE dari Kemenpan RB Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten Kota se Sulawesi Utara Tahun 2024 yang termuat dalam Kepmenpan RB Nomor 663 Tahun 2024.



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3,01	Baik
2	Pemerintah Kab. Minahasa	2,23	Cukup

-19-

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	2,46	Cukup
5	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	2,48	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,39	Cukup
7	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	3,37	Baik
8	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,34	Cukup
9	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	2,46	Cukup
10	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	3,02	Baik
11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,66	Baik
12	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,88	Baik

Sasaran strategis 2 Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah dengan indikator kinerja Persentase konten Layanan Pemerintahan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Target yang harus dicapai sebesar 70%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 100% sehingga hasil capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 142,86%. Adapun capaian kinerja sasaran strategis 2 didapatkan dari data di bawah ini :

No.	Jumlah konten Layanan Pemerintahan daerah yang diposting di website www.talaudkab.go.id Tahun 2025	Jumlah konten Layanan Pemerintahan daerah yang diposting di website www.talaudkab.go.id yang mendapat respon positif dari masyarakat Tahun 2025	Keterangan
1.	115 konten Layanan Pemerintahan dan informasi pemerintah daerah	115 konten Layanan Pemerintahan dan informasi pemerintah daerah yang mendapat respon positif dari masyarakat	Keseluruhan konten Layanan Pemerintahan dan informasi pemerintah daerah yang diposting di website Pemda Bulan Januari s/d Desember 2025 yang mendapat respon positif dan tidak mendapat respon negarif dari masyarakat yang mengunjungi website www.talaudkab.go.id

Sumber : Bidang IKP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025

Perhitungan capaian kinerja dihitung berdasarkan rumus seperti di bawah ini :

Jumlah konten Layanan Pemerintahan informasi pemerintah daerah yang mendapatkan respon positif dari masyarakat

total jumlah konten Layanan Pemerintahan yang diposting di website Pemda www.talaudkab.go.id

x 100

Untuk pencapaian indikator ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis sebagaimana target 70% pada tahun 2025 dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 100% Hasil ini didapat dari :

115 konten konten Layanan Pemerintahan informasi pemerintah daerah yang mendapatkan respon positif dari masyarakat

115 konten Layanan Pemerintahan informasi pemerintah daerah

x 100 = 100 %

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja di atas maka didapati realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 yaitu sebesar 70%. 115 konten konten Layanan Pemerintahan informasi pemerintah daerah didapat dari Jumlah konten tentang informasi dan komunikasi pemerintah daerah baik itu berita tentang kegiatan pemerintah daerah, dan informasi tentang pembangunan daerah yang diposting pada website Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu www.talaudkab.go.id sepanjang Tahun 2025. Dari 115 konten Layanan Pemerintahan informasi pemerintah daerah tersebut semuanya mendapatkan respon positif dan tidak ada yang mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Dengan demikian realisasi kinerja sasaran 2 yaitu sebesar 100% dari target capaian kinerja sasaran 2 pada Tahun 2025 sebesar 70%. Dengan demikian dari target tahun 2025 sebesar 70% maka capaian kinerja sebesar 100%

Sasaran Strategis 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah terdapat 2 Indikator yaitu indikator yang pertama yaitu Persentase Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik dan Indikator yang kedua Persentase kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik.

- *Indikator yang pertama* yaitu Persentase Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik dengan target yang harus dicapai sebesar 65%. Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Berdasarkan realisasi tersebut maka Capaian Kinerja indikator pertama Sasran Strategis 3 adalah sebesar 166,67%. Perhitungan Indikator capaian kinerja Sasaran didapat dari Total Jumlah OPD terkait pelayanan publik yang sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik yang diukur dari ketersediaan layanan internet dalam kondisi baik yang disediakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan dibiayai oleh Anggaran dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 kepada setiap OPD. Dari 29 OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud semuanya 29 OPD telah terhubung dengan layanan internet yang kualitasnya baik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Penyediaan Layanan Internet Telkom Indihome dan Astinet pada Tahun 2024. Adapun capaian kinerja sasaran strategis 2 didapatkan dari data dibawah ini :

No.	Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik lewat Jaringan Internet Berkualitas yang disediakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun disediakan oleh Dinas secara mandiri	Jenis Layanan Internet berkualitas	Ket.
1	SEKRETARIAT DAERAH	INFOTEK/INDIHOME	
2	SEKRETARIAT DPRD	INDIHOME	
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	INDIHOME	
4	DINAS KESEHATAN	INDIHOME	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	INDIHOME	
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	INDIHOME	
10	DINAS SOSIAL		
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	INDIHOME	
13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	INFOTEK/ASTINET/INDIHOME	
15	DINAS PERHUBUNGAN	INDIHOME	
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAHDAN TENAGA KERJA		
17	DINAS PERIKANAN	INDIHOME	
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
19	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	INDIHOME	
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
22	INSPEKTORAT	INDIHOME	
23	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	INDIHOME	
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	INDIHOME	
25	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	INDIHOME	
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
27	BADAN KESBANGPOL		
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
29	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	INDIHOME	

Sumber data : Bidang Pengelolaan E-Goverment Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025

Perhitungan capaian kinerja dihitung berdasarkan rumus seperti di bawah ini :

Jumlah perangkat daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik (diukur dari ketersediaan layanan internet dalam kondisi baik yang disediakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun yang disediakan secara mandiri oleh OPD Tahun 2025

x 100

total jumlah perangkat daerah

Untuk pencapaian indikator ini, dapat dijelaskan pada pengukuran sebagaimana target capaian yaitu dari 65 % pada tahun 2025 dengan realisasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 55,17% . Hasil ini didapat dari capaian :

16 OPD yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik

x 100 = 55,17 %

Total 29 OPD

Realisasi kinerja ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 yaitu sebesar 65%. Perhitungan Indikator capaian kinerja Sasaran didapat dari Jumlah Total Jumlah OPD terkait pelayanan publik yang sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik yang diukur dari ketersediaan layanan internet dalam kondisi baik yang disediakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun yang disediakan secara mandiri oleh OPD masing-masing sehingga OPD dapat menjalankan aplikasi pemerintahan dan layanan publik dengan baik. Dari 29 OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat 16 OPD yang telah terhubung dengan layanan internet yang kualitasnya baik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maupun yang disediakan secara mandiri oleh OPD masing-masing. Dengan demikian dari target 65% maka realisasi capaian kinerja sebesar **55,17%**.

- *Indikator yang kedua* Persentase kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik. Target yang harus dicapai Tahun 2025 sebesar 63,15% dan realisasi kinerja Januari sampai Bulan Desember 2025 sebesar 63,15%. Berdasarkan Realisasi tersebut maka Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 63,15%. Perhitungan Indikator capaian kinerja Sasaran didapat dari Jumlah Kecamatan yang terkait pelayanan publik yang sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik yang diukur dari ketersediaan layanan internet dalam kondisi baik di setiap Kecamatan, baik itu melalui Penyediaan Layanan Internet dari PT. Telkom lewat Indihome maupun Ketersediaan Layanan internet melalui BTS baik itu BTS PT. Telkomsel maupun BTS Bantuan Bakti Kementerian Kominfo RI. Dengan demikian dari target yang telah ditetapkan sebesar **63,15%** hasil yang dicapai tahun 2025 sebesar **63,15%** atau 12 Kecamatan dari 19 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Perhitungan capaian kinerja dihitung berdasarkan rumus seperti di bawah ini :

Jumlah kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik

total jumlah Kecamatan

x 100

Untuk pencapaian indikator ini, dapat dijelaskan pada pengukuran sebagaimana target capaian yaitu dari 50 % pada tahun 2023 dengan realisasi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% . Hasil ini didapat dari capaian :

12 kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik

19 jumlah Kecamatan

x 100 = 63,15 %

Adapun capaian kinerja Sasaran Strategis 3 Indikator kedua didapatkan dari data dibawah ini :

No.	Kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik melalui ketersediaan jaringan Internet berkualitas	Jenis Layanan Internet berkualitas	Ket.
1	Kecamatan Melonguane	Ketersediaan Layanan Internet dari INDIHOME PT Telkom dan BTS PT. Telkomsel Indonesia	
2	Kecamatan Beo Selatan	Ketersediaan Layanan Internet dari INDIHOME PT Telkom dan BTS PT. Telkomsel Indonesia	
3	Kecamatan Beo	Ketersediaan Layanan Internet dari INDIHOME PT Telkom dan BTS PT. Telkomsel Indonesia	
4.	Kecamatan Melonguane Timur	Ketersediaan Layanan Internet dari BTS Bantuan BAKTI Kementerian Kominfo	BTS Bantuan BAKTI diresmikan oleh Presiden RI tanggal 28 Desember 2023
5.	Kecamatan Tampan'amma	Ketersediaan Layanan Internet dari BTS Bantuan BAKTI Kementerian Kominfo dan BTS PT. Telkomsel Indonesia	BTS Bantuan BAKTI diresmikan oleh Presiden RI tanggal 28 Desember 2023
6.	Kecamatan Pulutan	Ketersediaan Layanan Internet dari BTS PT. Telkomsel Indonesia	
7.	Kecamatan Kabaruan	Ketersediaan Layanan Internet dari BTS PT. Telkomsel Indonesia dan BTS Bantuan BAKTI Kementerian Kominfo	
8.	Kecamatan Lirung	Ketersediaan Layanan Internet dari BTS PT. Telkomsel Indonesia dan BTS Bantuan BAKTI Kementerian Kominfo	
9.	Kecamatan Essang	Ketersediaan Layanan Internet dari BTS PT. Telkomsel Indonesia dan BTS Bantuan BAKTI Kementerian Kominfo	
10.	Kecamatan Salibabu	Ketersediaan Layanan Internet dari BTS PT. Telkomsel Indonesia	
11.	Kecamatan Moronge	Ketersediaan Layanan Internet dari BTS PT. Telkomsel Indonesia	
12.	Kecamatan Damau	Ketersediaan Layanan Internet dari BTS PT. Telkomsel Indonesia dan BTS Bantuan BAKTI Kementerian Kominfo	

Sumber Data : Bidang Penyelenggaraan E-Goverment Dinas Kominfo dan Statistik Tahun 2025

Sasaran strategis 4 Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas dengan indikator kinerja Persentase data statistik dan informasi pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah. Target yang harus dicapai sebesar 100%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 82,61%. Hasil capaian kinerja sasaran strategis 4 sebesar 82,61%. Capaian kinerja ini didapat dari jumlah data statistik sektoral yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah tahun 2025 yaitu 19 data statistik Sektoral dari 19 OPD yang masuk dan tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Bidang Statistik dan Persandian. Adapun total target data Statistik Sektoral yaitu 23 Data Statistik Sektoral dari 23 OPD sesuai Standar Data

SIPD Kemendagri yang harus tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah.

Perhitungan capaian kinerja dihitung berdasarkan rumus seperti di bawah ini :

Jumlah data statistik dan informasi pemerintah daerah yang
dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah

total data statistik dan informasi pemerintah daerah

x 100

Untuk pencapaian indikator ini, dapat dijelaskan pada pengukuran dan analisis yaitu dari target 100 % pada Tahun 2025 dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar 82,61% . Realisasi capaian kinerja ini didapat dari :

19 data statistik dan informasi pemerintah daerah yang dapat
dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah

23 total data statistik dan informasi pemerintah daerah

x 100 = 82,61%

Adapun capaian kinerja Indikator sasaran strategis 4 didapatkan dari data di bawah ini :

Nomor	Rincian Data statistik dan informasi pemerintah daerah berdasarkan Bidang Urusan Sesuai SIPD Kemendagri	Data statistik dan informasi pemerintah daerah (data statistik sektoral) yang tersedia di Dinas Kominfo dan Statistik yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah	Keterangan
1.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib pendidikan	Data Statistik Sektoral Urusan wajib Pendidikan	Dinas Dikpora
2.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib kesehatan	Data Statistik Sektoral Urusan wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Data Statistik Sektoral Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Statistik Sektoral Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUTR
4.	Data Statistik Sektoral Urusan Wajib Pemukiman dan Kawasan Pemukiman	Data Statistik Sektoral Urusan Wajib Pemukiman dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Pemukiman
5.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Data Statistik Sektoral Urusan wajib ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat	Kantor Satpol PP
6.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib sosial	-	Dinas Sosial
7.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Data Statistik Sektoral Urusan wajib pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	DP3APMD
8.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib pangan	Data Statistik Sektoral Urusan wajib pangan	DKPP
9.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib lingkungan hidup	-	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib pengendalian penduduk & keluarga berencana	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
11.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib perhubungan	-	Dinas Perhubungan

12.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib komunikasi dan informatika	Data Statistik Sektoral Urusan wajib komunikasi dan informatika	Dinas Kominfo dan Statistik
13.	Data Statistik Sektoral Data Statistik Sektoral Urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah	Data Statistik Sektoral Data Statistik Sektoral Urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
14.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib penanaman modal	Data Statistik Sektoral Urusan wajib penanaman modal	DPMPTSP
15.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib kepemudaan & olahraga	Data Statistik Sektoral Urusan wajib kepemudaan & olahraga	Dinas Dikpora
16.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib statistik dan persandian	Data Statistik Sektoral Urusan wajib statistik dan persandian	Dinas Kominfo dan Statistik
17.	Data Statistik Sektoral Urusan wajib kebudayaan	Data Statistik Sektoral Urusan wajib kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18.	Data Statistik Sektoral Urusan umum	Data Statistik Sektoral Urusan umum	Bapelitbang, Setwan, BKPSDM, BPKAD, BP2RD
19.	Data Statistik Sektoral Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Data Statistik Sektoral Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
20.	Data Statistik Sektoral Urusan pilihan pariwisata	Data Statistik Sektoral Urusan pilihan pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21.	Data Statistik Sektoral Urusan pilihan pertanian	Data Statistik Sektoral Urusan pilihan pertanian	DKPP
22.	Data Statistik Sektoral Urusan pilihan perdagangan	Data Statistik Sektoral Urusan pilihan perdagangan	Dinas Perindag
23.	Data Statistik Sektoral Urusan pilihan perindustrian	Data Statistik Sektoral Urusan pilihan Perindustrian	Dinas Perindag
Jumlah	23	19	

Sumber data : Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo dan Statistik Tahun 2024

Nomor	Bidang Urusan sesuai SIPD Kemendagri	Rincian Data statistik dan informasi pemerintah daerah (data statistik sektoral) sesuai Bidang Urusan yang tersedia di Dinas Kominfo dan Statistik yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah	Keterangan
1.	Urusan wajib pendidikan	I. Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah II. Pendidikan Anak Usia Dini III. Sekolah Taman Kanak-Kanak IV. Pendidikan Dasar V. Pendidikan Menengah Pertama VI. Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan VII. Pendidikan Non Formal	Dinas Dikpora
2.	Urusan wajib kesehatan	I. Kesehatan Masyarakat II. Pusat Pelayanan Kesehatan III. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	I. Jalan dan Jembatan II. Jaringan Irigasi/Pengairan III. Sempa dan Sumber Air V. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Rumah Tangga VI. Jumlah Desa/Kelurahan yang Rawan Sumber Air Baku	Dinas PUTR

		VII. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik VIII. Drainase	
4.	Urusan Wajib Pemukiman dan Kawasan Pemukiman	I. Perumahan II. Persampahan III. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik IV. Rumah Tangga Memiliki Air Bersih V. Jumlah dan Luas Tempat Pemakaman Umum VI. Jumlah dan Luas Ruang Terbuka Hijau VII. Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Pemukiman
5.	Urusan wajib ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	I. Keamanan dan Ketertiban Umum II. Unjuk Rasa	Kantor Satpol PP
6.	Urusan wajib pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA I. Administrasi Pemerintahan Desa* II. Pemerintah Desa/Kelurahan* III. Lembaga Kemasyarakatan* PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK I. Pemberdayaan Perempuan dan Anak* II. Perlindungan Perempuan dan Anak* III. Kualitas Keluarga* IV. Pendidikan Perempuan dan Anak*	DP3APMD
7.	Urusan wajib pangan	I. Produksi Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein* II. Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein* III. Konsumsi Penduduk Terhadap Kelompok Bahan Pangan* IV. Pergudangan*	DKPP
8.	Urusan wajib komunikasi dan informatika	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I. Telekomunikasi* II. Pos* III. Layanan Media Elektronik* IV. Media Cetak*	Dinas Kominfotik
9.	Urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah	I. UMKM Perbidang Usaha* II. Koperasi* III. Perbankan*	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
10.	Urusan wajib penanaman modal	I. Jumlah Penanaman Modal Asing* II. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri* III. Jumlah Penanaman Modal Non PMA/PMDN*	DPMPTSP
11.	Urusan wajib kepemudaan & olahraga	I. Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah* II. Pendidikan Anak Usia Dini* III. Sekolah Taman Kanak-Kanak* IV. Pendidikan Dasar* VI. Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan* VII. Pendidikan Non Formal*	Dinas Dikpora
12.	Urusan wajib	URUSAN STATISTIK	Dinas

	statistik dan persandian	1. Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi data statistik sektoral 2. Metadata statistik sektoral yang dihimpun 3. Perangkat jaringan yang tersedia 4. SDM yang sudah mengikuti pendidikan URUSAN PERSANDIAN 1. Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 2. Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 3. Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 4. Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 5. Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota 6. Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik 7. Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik 8. Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Kominfo
13.	Urusan wajib kebudayaan	I. Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya* II. Pegiat Seni Dan Budaya* III. Cagar Budaya* IV. Permuseuman*	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14.	Urusan umum	URUSAN UMUM BAPELITBANG 1. Geografis* 1. Luas Wilayah** 2. Letak Geografis* 3. Batas Wilayah* 4. Klimatologi* 5. Kewilayahan* 6. PDRB* 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Kabupaten,Kota Dan Provinsi) URUSAN UMUM SETWAN 1. Jumlah Anggota DPRD** II. Administrasi Pemerintahan* 1. Kepegawaiaan* 1. Jumlah Pegawai Tetap 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan** 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan** 2. Jumlah Pegawai Honor**	Bapelitbang, Setwan, BKPSDM, BPKAD, BP2RD

		URUSAN UMUM BPKAD & BP2RD I. Keuangan Daerah* 2. Jumlah Belanja** 3. Jumlah Pembiayaan** II. Neraca* 1. Aset* 2. Kewajiban* 3. Ekuitas* 4. Rasio Lancar 5. Rasio Quick 6. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset 7. Rasio Hutang Terhadap Modal	
15.	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	I. Perikanan Tangkap Laut* 1. Jumlah Hasil Tangkapan Ikan 2. Nilai Hasil Tangkapan Ikan 3. Jumlah Hasil Tangkapan Lainnya 4. Nilai Hasil Laut Lainnya 5. Jumlah Nelayan 6. Kapal Penangkap Ikan* 7. Perijinan Kapal Motor Penangkap Ikan* 8. Kasus Pencurian Ikan* 9. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan 10. Jumlah Cold Storage 11. Jumlah Dermaga Tambat Perahu/Kapal Penangkap Ikan Rakyat** 12. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut* 13. Terumbu Karang* 14. Garam* 15. Rumput Laut* 16. Penangkapan Ikan Perairan Umum* 17. Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Laut* II. Perikanan Budidaya* 1. Budidaya Air Laut* 2. Budidaya Air Tawar* 3. Budidaya Air Payau* 4. Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Tawar* III. Benih, Industri dan Nilai Perikanan* 1. Balai Benih Ikan* 2. Pembenihan Ikan Rakyat* 3. Industri Pengolahan* 4. Nilai Tukar Pembudidaya Air Laut 5. Nilai Tukar Pembudidaya Air Tawar 6. Nilai Tukar Pembudidaya Air Payau 7. Volume dan Nilai Eksport Perikanan* 8. Volume dan Nilai Eksport Rumput Laut* 9. Volume dan Nilai Eksport Hasil Laut Lainnya*	Dinas Perikanan
16.	Urusan pilihan pariwisata	I. Jumlah Obyek Wisata* II. Jumlah Kunjungan Wisatawan* III. Kunjungan Wisatawan Per Objek Wisata* IV. Lama Kunjungan Wisatawan* V. Jenis Penginapan*	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		VI. Biro Wisata Dan Agen Perjalanan Wisata* VII. Jumlah Pemandu Wisata* VIII. Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman* IX. Kategori Restoran Berdasarkan Jenis Makanan XI. Penerimaan Daerah Dari Pariwisata*	
17.	Urusan pilihan pertanian	I. Tanaman Pangan* II. Hortikultura* III. Perkebunan* IV. Peternakan dan Kesehatan Hewan* V. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian*	DKPP
18.	Urusan pilihan perdagangan	I. Sarana Perdagangan* 1. Jumlah Pasar Tradisional** 2. Jumlah Pasar Modern** 3. Pertokoan** 4. Jumlah Rumah Potong Hewan** II. Ekspor* 1. Volume Ekspor Menurut Komoditi** 2. Nilai Ekspor Menurut Komoditi** 3. Jumlah Nilai Free On Board (FOB) Komoditi** 4. Nilai Eksport Berdasarkan Negara Tujuan** 5. Jumlah Nilai Free On Board (FOB) Negara Tujuan III. Import* 1. Nilai Import Negara Asal** 2. Jumlah Nilai Cost Insurence Freight (CIF) Negara Asal	Dinas Perindag
19.	Urusan pilihan perindustrian	I. Jenis Industri Kecil* II. Jenis Industri Sedang* III. Jenis Industri Besar* IV. Jumlah Industri Besar yang Menerapkan K3* V. Industri Rumah Tangga Wajib Ijin Gangguan 1. Jumlah Perusahaan Memiliki Ijin Gangguan 2. Jumlah Perusahaan yang Tidak Memiliki Ijin Gangguan	Dinas Perindag
Jumlah	19 Data Statistik Sektoral		

Sumber data : Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo dan Statistik Tahun 2025

3.1.2 Perbandingan dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara capaian target Kinerja Tahun 2024 dan capaian Target Kinerja pada Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dapat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.2

Perbandingan antara pencapaian target Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 dan Capaian Target Kinerja pada Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Tahun 2024			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas	Indeks SPBE	Indeks	3	2.39	79,67	Indeks	2,50	2.39	95,60
2	Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Persentase konten Layanan Pemerintahan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat	Persentase	70%	100%	142,86	Persentase	60%	100%	166,67
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik	Persentase	65%	55,17%	84,88	Persentase	60%	100%	166.67

		persentase kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik	Persentase	63,15%	63,15%	100.00	Persentase	47.36%	47.36%	100.00
4	Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas	Persentase data statistik dan informasi pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah	Persentase	100%	82.61%	82.61	Persentase	100%	82.61%	82.61

Dari Tabel 3.1.2 di atas dapat di jelaskan perbandingan capaian target kinerja sasaran strategis Tahun 2025 dan capaian target kinerja sasaran strategis tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik, target yang harus dicapai pada tahun 2025 sesuai dengan Renstra Perubahan 2020-2025 Indeks SPBE sebesar 3 poin. Hasil Indeks SPBE yang dipakai masih menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 665 Tahun 2024 adalah 2,39 poin atau realisasi sebesar **79,67%**. Perbandingan dengan tahun 2024 target yang harus dicapai Indeks SPBE sebesar 2,50 dengan realisasi Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Keputusan MenPAN RB Republik Indonesia Nomor 665 Tahun 2024 berada pada 2,39 poin dengan capaian kinerja **95,60%**. Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penurunan realisasi capaian kinerja yang dicapai dimana pada tahun 2024 sebesar 95,60% dan pada tahun 2025 sebesar 84,88%, hal ini dikarenakan karena tidak dilaksanakannya penilaian indeks SPBE oleh Kemenpan RB untuk Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga penilaian masih menggunakan nilai Indeks SPBE Tahun 2024. Selain itu juga karena anggaran infrastruktur untuk penunjang capaian indeks SPBE yang tidak tersedia sehingga tidak dapat menunjang implementasi pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sasaran strategis 2 Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah dengan indikator kinerja Persentase konten Layanan Pemerintahan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Target yang harus dicapai sebesar 70. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 100% sehingga hasil capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 142,86%. Perbandingan dengan Tahun 2024 Target yang harus dicapai sebesar 60% dengan realisasi yang dicapai 100% sehingga hasil capaian kinerja sasaran strategis 2 pada Tahun 2024 sebesar 166,67%. Dari table di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2024 sama sebesar 100%.

Sasaran Strategis 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah *Indikator pertama* yaitu Persentase Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik dengan target yang harus dicapai sebesar **65%**. Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 55,17%. Berdasarkan realisasi tersebut maka Capaian Kinerja indikator pertama sebesar 84,88%. Perbandingan dengan Tahun 2024 Target yang harus dicapai sebesar 55% dengan realisasi yang dicapai 100% dan capaian kinerja 84,88%. Dari hasil capaian kinerja sasaran strategis 3 indikator 1 pada Tahun 2025 terjadi penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan

karana tidak tersedia anggaran yang mencukupi sehingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak dapat menyediakan layanan internet ke setiap OPD pada Tahun 2025.

Indikator kedua Persentase kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik. Target yang harus dicapai Tahun 2025 sebesar **63,15%** dan capaian kinerja sebesar **63,15%**. Capaian Kinerja indikator kedua Tahun 2025 sebesar **100%**. Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa tahun 2024 dengan target kinerja **47,36%** dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 sebesar **47,36%** Indikator kedua Sasaran Strategis 3 Tahun 2025 adalah sebesar 100% dan tahun 2024 adalah sama sebesar 100%.

Sasaran strategis 4 Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas dengan indikator kinerja Persentase data statistik dan informasi pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah. Target yang harus dicapai tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 82,61%. Berdasarkan Realisasi tersebut maka Capaian kinerja sasaran strategis 4 adalah sebesar 82,61%. Perbandingan dengan Tahun 2024 Target Sasaran Strategis 4 yang harus dicapai adalah sebesar 100%. dengan realisasi yang dicapai 82,61% sehingga hasil capaian kinerja Sasaran Strategis 4 pada Tahun 2023 sebesar 82,61%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sama sebesar 82,61%.

3.1.3 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.3 di bawah ini :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (2025)	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas	Indeks SPBE	3	2.39	79.67%
2.	Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Persentase konten Layanan Pemerintahan yang mendapatkan respon positif dari Masyarakat	70%	100%	142.86%

3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik	65%	55,15%	84,88%
		Persentase kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik	63,15%	63,15%	100 %
4	Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas	Persentase data statistik dan informasi pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah	100%	82.61%	82.61%

Dari Tabel 3.1.3 diatas dapat dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik, target yang harus dicapai sesuai dengan Renstra Perubahan 2020-2025 Indeks SPBE 3 poin. Hasil Indeks SPBE yang dicapai masih menggunakan capaian kinerja Tahun 2024 adalah 2,39 poin. Capaian kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra perubahan adalah sebesar 79,67%.

Sasaran strategis 2 Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah dengan indikator kinerja yaitu Persentase konten Layanan Pemerintahan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Target yang harus dicapai sesuai target jangka menengah pada Renstra Perubahan 2020-2025 (Tahun 2025) sebesar 70%. Realisasi yang dicapai tahun 2025 adalah sebesar 100%. Capaian kinerja sasaran strategis 2 dengan target jangka menengah pada Renstra perubahan adalah sebesar 142.86%.

Sasaran Strategis 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah
Indikator pertama yaitu Persentase Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik sesuai target jangka menengah pada Renstra Perubahan 2020-2025 (Tahun 2025) sebesar 65%. Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 55,17%. Berdasarkan realisasi tersebut maka Capaian Kinerja indikator pertama dengan target jangka menengah pada Renstra perubahan adalah sebesar 84,88%,.

Indikator yang kedua Persentase kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik. Target yang harus dicapai sesuai target jangka menengah pada Renstra Perubahan 2020-2025 (Tahun 2025) sebesar

63,15% dan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 63,15%. Berdasarkan Realisasi tersebut maka Capaian Kinerja Indikator 2 Sasaran Strategis 3 target jangka menengah pada Renstra Perubahan 2020-2025 (Tahun 2025) adalah sebesar 100%

Sasaran strategis 4 Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas dengan indikator kinerja Persentase data statistik dan informasi pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah. Target yang harus dicapai sesuai target jangka menengah pada Renstra Perubahan 2020-2025 (Tahun 2025) sebesar 100%. Realisasi yang dicapai tahun 2025 adalah sebesar 82,61%. Berdasarkan Realisasi tersebut maka Capaian kinerja sasaran strategis 4 sesuai target jangka menengah pada Renstra Perubahan 2020-2025 (Tahun 2025) adalah sebesar 82,61%.

3.1.4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Untuk pengukuran capaian kinerja dengan Standar Nasional dapat dijelaskan bahwa indikator sasaran yang diukur sesuai standar nasional terdapat pada Sasaran 1 dengan indikator sasaran yaitu Indeks SPBE dengan sasaran yang diukur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sesuai dengan hasil evaluasi Indeks SPBE Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan pemerintah Daerah Tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Talaud berada pada poin 2,39 poin. Untuk Realisasi capaian kinerja dengan standar nasional dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.4 Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

No	Indikator	RPJMD		Standar Nasional	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Indeks SPBE	3	2,39	2,6	3,12

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk target indikator Indeks SPBE yaitu sebesar 3 dengan realisasi yang digunakan hasil pengukuran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2025 yaitu 2,39. Dibandingkan dengan Standar Nasional dengan target indeks SPBE sebesar 2,6 dengan realisasi capaian sebesar 3,12. Dari perbandingan pada tabel di atas maka capaian Indeks SPBE masih di bawah capaian dari Indeks SPBE Nasional Tahun 2025 sebesar 3,12 poin.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sasaran I : Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas

1. Penyebab kegagalan pencapaian kinerja adalah tidak tersedia anggaran yang mencukupi dalam menunjang implementasi SPBE sehingga tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik dengan maksimal. Hasil penilaian yang digunakan masih berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan pemerintah Daerah Tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Talaud berada pada poin 2,39 poin

Permasalahan yang dialami dalam peningkatan pencapaian indeks SPBE adalah belum terbangunnya Infrastruktur pendukung penyelenggaraan SPBE seperti layanan intra pemerintah daerah dan command center di Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga membuat capaian Indeks SPBE Tahun 2024 untuk Kabupaten Kepulauan Talaud masih berada pada 2,39 poin hanya mengalami kenaikan sebesar 0,21 poin dari tahun 2023. Minimnya Anggaran yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan SPBE yang tertata di APBD pada Tahun 2025 di dalam Program pengelolaan aplikasi informatika serta kekurangan SDM teknis TIK. Selain itu adanya hutang belanja Jasa Internet Pemda Tahun 2024 yang belum terbayarkan ke pihak PT. Telkom sampai akhir tahun anggaran 2025 yang menjadi kendala dalam penyediaan internet berkualitas dari PT Telkom kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan mengusulkan kembali kegiatan dan sub kegiatan untuk penyediaan Infrastruktur SPBE serta kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan untuk penyelenggaraan SPBE. Mengusulkan permintaan SDM Teknis TIK serta Pejabat Fungsional setara Eselon 4 untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional setara eselon 4 pada Bidang Penyelenggaraan E-Government ke BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sasaran II : Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah

1. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas konten yang baik yang disediakan pada website www.talaudkab.go.id. Sehingga konten yang diunggah pada website pemda yang berupa informasi pembangunan daerah, kegiatan pemerintah daerah, serta berita tentang pembangunan dan pemerintahan maupun konten lainnya merupakan konten yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang mengunjungi website pemda. Adapun permasalahan yang

dihadapi dalam pencapaian strategis 2 adalah ketersediaan anggaran yang minim pada program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 2 di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah konten berita pemerintahan daerah yang diupload di website pemda www.talaudkab.go.id dibandingkan dengan tahun 2024.

2. Solusi yang telah yaitu melakukan pengusulan anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk penatalaksanaan Informasi dan Komunikasi Publik pada APBD Tahun 2026 sesuai kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan dengan Renstra Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran 2. Selain itu mengikuti pelatihan teknis dalam memperlengkapi ASN.

Sasaran III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah

1. Adapun penyebab kegagalan / keberhasilan dalam pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah pada Tahun 2025 adalah ketersediaan Anggaran dalam Penyediaan Layanan Jaringan Internet yang berkualitas bagi setiap OPD pada tahun 2025 tidak mencukupi. Hal ini mengakibatkan masih terdapat hutang pembayaran jasa internet pemda ke PT. Telkom Indonesia tahun 2024 sebesar 205.000.000 yang tidak terbayar sampai dengan akhir tahun 2025. Sebagai akibat maka terjadi hambatan dalam penyediaan layanan internet Pemda oleh PT. Telkom Indonesia.

Dalam pencapaian indikator sasaran 3 pembangunan infrastruktur layanan Internet di kecamatan dan desa melalui Pembangunan BTS PT. Telkomsel Indonesia dan Bantuan BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai jawaban atas usulan pembangunan BTS di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka penyediaan jaringan internet di Kecamatan Blank Spot. BTS Bantuan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika RI diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada tanggal 28 Desember 2023. Dan ada 10 BTS bantuan BAKTI Kominfo diaktivasi pada awal Tahun 2024 dan 2025. Selain itu ketersediaan internet yang berkualitas juga melalui layanan Indihome Telkom yang telah melayani Kecamatan Melonguane, Beo Selatan, Beo, Rainis dan Melong Timur.

2. Solusi yang telah dilakukan dengan mengusulkan kembali pembayaran Hutang pada APBD tahun untuk pembayaran Internet Pemda Tahun 2024 yang sebelumnya tidak terbayar pada APBD TA. 2025. Selanjutnya untuk kebutuhan penyediaan layanan Internet Pemda Tahun 2026 adalah melakukan pengusulan kebutuhan anggaran kegiatan dan sub kegiatan untuk penyediaan layanan internet Pemda pada APBD Tahun 2026 dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 Tahun 2025.

3. *Sasaran IV : Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas*

1. Adapun penyebab kegagalan dalam pencapaian Sasaran 3 Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas adalah ketersediaan dana yang tidak memadai untuk pada Program Penyelenggaraan statistik sektoral. Anggaran yang tersedia pada Program Penyelenggaraan statistik sektoral untuk mendukung pencapaian Sasaran 3 hanya Rp. 30.141.000,- yang terbagi pada kegiatan dan beberapa sub kegiatan. Selain itu ketersediaan SDM Teknis Statistik belum memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Bidang Statistik.
2. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan mengusulkan penambahan anggaran pada APBD perubahan 2025 tetapi tidak terakomodir. Mengusulkan anggaran Program dan Kegiatan serta sub kegiatan sesuai kebutuhan pada Program Penyelenggaraan statistik sektoral pada APBD Tahun 2026. Selain itu langkah yang diambil adalah melakukan pengusulan permintaan SDM Teknis Statistik pada Bidang Statistik dan Persandian ke BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.1.6 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran I : Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas

Dalam mencapai target indikator sasaran 1 maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan efisiensi dalam sumber daya manusia dengan memaksimalkan SDM yang tersedia di Bidang Penyelenggaraan E-Government. Dengan keadaan SDM bidang E Government kondisi yang ada saat ini ada 1 jabatan Fungsional dari 3 jabatan fungsional setara eselon 4 yang kosong sehingga membuat kinerja menjadi terbatas. Demikian juga untuk tenaga teknis TIK pelaksana yang masih sangat kekurangan. Selain itu efisiensi juga dilakukan pada keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur yang ada dalam menunjang pencapaian indeks SPBE. Sumber daya sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu Jaringan intra pemerintah daerah dan command center serta sarana berupa Laptop dengan spesifikasi tinggi dalam menunjang pelaksanaan tupoksi E Government untuk pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas dengan indikator Indeks SPBE. Efisiensi anggaran juga dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada pada Tahun Anggaran 2025.

Sasaran II : Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah

Dalam mencapai target indikator sasaran 2 maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah melakukan Efisiensi Sumber daya yang dibutuhkan menunjang pencapaian Sasaran 2 Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah. Dengan keterbatasan SDM yang ada yaitu belum tersedianya SDM bidang jurnalistik dan pengelola konten web maka

dengan SDM yang ada melakukan tugas dalam meliput dan membuat konten berita serkaligus juga dengan mengelola website pemda. Kebutuhan akan SDM teknis dalam pengelolaan Web dan Jurnalistik dan pengelola konten sangat dibutuhkan saat ini sehingga kualitas konten website pemda akan terus meningkat. Dalam keterbatasan sarana dan prasarana yang ada maka Sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini personal komputer dengan spesifikasi yang mendukung pengelolaan web maupun pembuatan konten teks maupun audio visual serta pengadaan Perlengkapan Jurnalistik seperti Kamera Profesional yang bisa mengambil foto maupun video kualitas tinggi. Untuk efisiensi anggaran telah dilakukan sehingga dengan anggaran yang sangat minim mampu mencapai target indikator sasaran 2.

Sasaran III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah

Dalam mencapai target indikator sasaran 3 *Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah* maka Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik telah melakukan Efisiensi Sumber daya yang dibutuhkan menunjang pencapaian Sasaran 3 dengan memaksimalkan SDM yang tersedia maupun sumber daya sarana dan prasarana yang ada termasuk efisiensi Anggaran yang tersedia. Adapun Sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah yaitu Sumber Daya Manusia teknis Teknologi dan Informasi yang harus ditingkatkan dengan cara pelatihan SDM maupun pelaksanaan Bimtek Teknologi Informasi. Selain itu Pengisian jabatan Fungsional setara eselon 4 sangat penting dalam rangka pelaksanaan tupoksi. Sumber daya Sarana dan Prasarana yang sangat penting dibutuhkan dalam rangka penyediaan layanan jaringan Internet berkualitas untuk OPD dan setiap Kecamatan. Untuk Kecamatan yang belum dilayani oleh Indihome Telkom maka Ketersediaan Layanan internet berkualitas melalui Pembangunan BTS Bakti Kementerian Kominfo maupun BTS dari PT. Telkomsel. Indonesia.

Sasaran IV : Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas

Dalam mencapai target indikator sasaran 4 *Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas* maka Dinas Komunikasi, Informatik dan Statistik telah melakukan Efisiensi Sumber daya yang dibutuhkan menunjang pencapaian Sasaran 4 dengan memaksimalkan SDM yang tersedia maupun sumber daya sarana dan prasarana yang ada termasuk efisiensi Anggaran yang tersedia. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pencapaian Sasaran 4 Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas yaitu Sumber daya manusia teknis statistik dan sumber daya sarana dan prasarana. Untuk ketersediaan data Statistik yang akurat

berbanding lurus dengan penyediaan pelatihan Statistik untuk peningkatan SDM. Adapun dalam Sumber daya Sarana dan prasarana statistik dalam menunjang pencapaian target kinerja Sasaran Strategis 4 masih sangat minim sehingga perlu ditingkatkan.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran I : Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas

1. Program/kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu Program pengelolaan aplikasi informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Tidak ada Program dan Kegiatan yang tidak menunjang pencapaian kinerja.

Sasaran II : Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah

1. Program/kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagai berikut Program Informasi dan Komunikasi Publik dan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Tidak ada Program dan Kegiatan yang tidak menunjang pencapaian kinerja.

Sasaran III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah

1. Program/kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu Program pengelolaan aplikasi informatika. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab./ Kota dan Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab./Kota
2. Tidak ada Program dan Kegiatan yang tidak menunjang pencapaian kinerja.

Sasaran IV : Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas

1. Program/kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu Program penyelenggaraan statistik sektoral. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota
2. Tidak ada Program dan Kegiatan yang tidak menunjang pencapaian kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2024 menjabarkan pagu anggaran yang mendukung Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran beserta realisasi anggaran tahun anggaran 2024 beserta target indikator sasaran serta realisasi kinerja tahun 2024. Adapun tabel seperti di bawah ini :

Tabel 3.2.1 Tabel Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Sasaran

No.	Sasaran	Indikator	Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja	
			Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas	Indeks SPBE	371.978.446	303.874.800	3	2.39
2	Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Persentase konten Layanan Pemerintahan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat	325.886.000	310.391.500,	70%	100%
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik	360.967.946	293.972.700	65%	55,17%
		Persentase kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik			63,15%	63,15%
4	Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas	Persentase data statistik dan informasi pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah	30.141.000	16.992.200,	100%	82,61%

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 4 (empat) Program Strategis dan dijabarkan dalam 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan total Pagu Program Strategis sebesar Rp. 728.005.446 dan total Realisasi Anggaran Program Strategis Tahun 2025 sebesar Rp. 639.023.700 atau sebesar 87,27%. Adapun Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis Tahun 2025 dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.2 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Strategis Tahun 2025

NOMOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp325.886.000,00	Rp310.391.500,00	95,25
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp325.886.000,00	Rp310.391.500,00	95,25
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Rp3.500.000,00	Rp0,00	0,00

2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp16.140.000,00	Rp14.629.200,00	90,64
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp11.180.000,00	Rp11.060.000,00	98,93
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp283.976.000,00	Rp274.230.000,00	96,57
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Rp11.090.000,00	Rp10.472.300,00	94,43
2.16.03	<i>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</i>	<i>Rp360.967.946,00</i>	<i>Rp293.972.700,00</i>	<i>81,44</i>
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp33.600.000,00	Rp16.650.000,00	49,55
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Rp33.600.000,00	Rp16.650.000,00	49,55
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp327.367.946,00	Rp277.322.700,00	84,71
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Rp2.580.000,00	Rp2.356.800,00	91,35
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp10.362.600,00	Rp8.221.100,00	79,33
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp34.499.346,00	Rp32.300.000,00	93,62
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Rp8.594.000,00	Rp8.553.600,00	99,53
2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Rp11.392.000,00	Rp11.206.000,00	98,37
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp259.940.000,00	Rp214.685.200,00	82,59
2.20.02	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</i>	<i>Rp30.141.000,00</i>	<i>Rp24.757.400,00</i>	<i>82,14</i>
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp30.141.000,00	Rp24.757.400,00	82,14
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp8.727.500,00	Rp7.514.200,00	86,10
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rp2.552.000,00	Rp2.494.200,00	97,74
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp3.850.000,00	Rp0,00	0,00
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp15.011.500,00	Rp14.749.000,00	98,25
2.21.02	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</i>	<i>Rp11.010.500,00</i>	<i>Rp9.902.100,00</i>	<i>89,93</i>
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.728.500,00	Rp4.420.000,00	93,48
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.728.500,00	Rp4.420.000,00	93,48
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp6.282.000,00	Rp5.482.100,00	87,27
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.282.000,00	Rp5.482.100,00	87,27
JUMLAH		Rp728.005.446,00	Rp639.023.700,00	87,27

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud telah disusun berdasarkan Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Akhirnya, semoga LKj.IP ini menjadi landasan dan pendorong bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

4.1 KESIMPULAN

- Dari 4 (empat) sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud diukur tingkat capaian target kinerja dengan 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2025 yaitu :

Tabel IV. 1 Pencapaian Target Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Terwujudnya layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang berkualitas	Indeks SPBE	3.00	2.39	79,67
2.	Terciptanya masyarakat yang responsif terhadap layanan komunikasi dan informasi pemerintah daerah	Persentase konten Layanan Pemerintahan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat	70%	100%	142,86
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terkait pelayanan publik dengan sarana prasarana tik dalam kondisi baik	65%	55,17%	84,88%
		Persentase kecamatan yang kualitas pelayanan publiknya baik dengan sarana dan prasarana tik dalam kondisi baik	63,15%	63,15%	100.00
4	Terwujudnya akurasi data statistik dan informasi kinerja pelayanan pemerintah yang valid dan berkualitas	Persentase data statistik dan informasi pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan daerah	100%	82.61%	82.61

2. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pencapaian target Kinerja Sasaran Straregis Tahun 2025 didukung oleh 4 Program strategis yaitu Program pengelolaan aplikasi informatika, Program informasi dan komunikasi publik, Program penyelenggaraan statistik sektoral, Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Program dan kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung capaian kinerja Sasaran telah terlaksana dengan total alokasi anggaran Rp.728.005.446,- dengan realisasi sebesar Rp. 639.023.700,- atau capaian sebesar 87,27% dengan kategori capaian kinerja sasaran Tahun 2025 Sangat Baik .

4.2 SARAN

1. Perlu peningkatan alokasi anggaran untuk 4 (empat) Program Strategis dalam rangka peningkatan kinerja demi tercapainya target kinerja sasaran tahun selanjutnya.
2. Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks SPBE perlu langkah strategis yang harus diambil yaitu pembangunan infrastruktur SPBE dan pemenuhan dokumen SPBE serta implementasi pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini dapat dicapai dengan perhatian khusus dari Pimpinan Daerah untuk implementasi SPBE dan kerja sama serta kolaborasi seluruh OPD di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pelaksana SPBE.
3. Peningkatan kualitas SDM Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga perlu diprioritaskan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis pada tahun berikutnya. Hal ini penting karena dibutuhkan SDM yang handal dan profesional dalam pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

Melonguane, Januari 2026



SITI LA F. BENTIAN, S.Si., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19790306 200701 2 012